KR-Antara/Zabur Karuru

***KORBAN SEMERU:** Fadli Taha (45 tahun) berpose dengan foto keluarganya di depan rumahnya yang tertimbun material awan panas guguran Gunung Semeru di Desa Sumberwuluh, Lumajang, Jawa Timur, Selasa (7/12). Akibat terjangan guguran awan panas Semeru, sejumlah rumah warga rusak dan puluhan warga hilang. Beritanya di halaman 1.*

PEMDA DIY SESUAIKAN ATURAN

PPKM Level 3 Batal Diberlakukan Menyeluruh

JAKARTA (KR) - Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 selama periode Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) batal diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia. Kendati PPKM Level 3 batal diberlakukan, namun kebijakan pengetatan aturan tetap diterapkan.

Penerapan PPKM selama Nataru tetap mengikuti asesmen situasi pandemi Covid-19 sesuai yang berlaku saat ini, namun dengan beberapa pengetatan. Menurut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan yang juga Koordinator Penanganan PPKM Jawa-Bali, keputusan pembatalan pemberlakuan PPKM Level 3 berdasarkan capaian vaksinasi dosis satu di Jawa-Bali yang sudah mencapai 76 persen dan dosis dua yang mendekati 56 persen. Sedangkan vaksinasi untuk lanjut usia terus ditingkatkan, yang kini mencapai 64 persen untuk dosis satu dan 42 persen untuk dosis dua di Jawa dan Bali.

"Sedangkan syarat perjalanan tetap diperketat, terutama di perbatasan untuk penumpang dari luar negeri. Namun kebijakan PPKM di masa Nataru dibuat lebih seimbang disertai aktivitas testing dan tracing yang tetap digencarkan," ujar Luhut dalam keterangan tertulisnya.

Sebelumnya, PPKM Level 3 akan diterapkan di seluruh provinsi pada 24 Desember 2021- 2 Januari 2022. Pembatalan dilakukan karena Pemerintah ingin membuat kebijakan yang lebih seimbang dengan tidak menyamaratakan perlakuan di semua wilayah Indonesia saat momen Nataru. Menanggapi keputusan terbaru tersebut, Pemda DIY siap mengikuti kebijakan Pemerintah Pusat. Pemda DIY akan menyesuaikan berbagai kebijakan yang ada dengan aturan baru tersebut. Sebab PPKM Level 3 ada pengaruh dari sisi pariwisata, baik sisi positif maupun negatifnya.

Sisi positifnya, penerapan PPKM Level 3 akan memberikan batasan ke masyarakat supaya tidak abai terhadap penegakan protokol kesehatan. Namun akan berdampak negatif dari sisi ekonomi karena kehadiran wisatawan menjadi kunci pertumbuhan ekonomi.

"Jadi soal penerapan PPKM di DIY kami masih menunggu hasil assesment. Nanti DIY berada di level berapa, apakah Level 2 atau 3. Kemudian kita akan melakukan PPKM berdasarkan assesment, bukan berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara umum. Jadi prinsipnya Pemda DIY meminta kepada seluruh jajaran terutama destinasi wisata, hotel dan semua yang terkait dengan pariwisata untuk tetap dan selalu mengedepankan prokes," kata Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji di Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (7/12).

Baskara Aji mengatakan, bagi wisatawan dan destinasi wisata yang melakukan pelanggaran prokes harus diberikan peringatan. Bahkan seandainya destinasi wisata itu sudah diperingatkan dan tetap melakukan pelanggaran akan ditutup untuk sementara waktu. Semua itu untuk menjaga agar masyarakat terlindungi dari Covid-19.

Kepala Disdikpora DIY Didik Wardaya MPd menyatakan, sebelum Pemerintah membatalkan kebijakan PPKM Level 3, untuk menekan mobilitas, libur akhir semester diputuskan untuk ditiadakan. Begitu pula untuk pengambilan rapor siswa ditunda hingga Januari 2022. Karena itu terkait adanya kebijakan baru, Disdikpora DIY masih menunggu arahan dari pusat. **(Ria/Ira)-f**

LIGA 1 2021

Mantan Gagalkan Tiga Poin PSS

SOLO (KR) - Rasa sakit kembali diterima PSS Sleman pada pekan ke-16 Liga 1 2021-2022. Menghadapi Persipura Jayapura di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, Selasa (7/12) sore, PSS dipaksa bermain imbang 1-1.

KR-Antara/Aloysius Jarot Nugroho

Pesepakbola PSS Sleman Kim Kurniawan (kiri) berusaha melewati hadangan pesepakbola Persipura Jayapura Elisa Yahya Basna pada pertandingan Liga 1 di Stadion Manahan, Solo.

Perih kian terasa setelah sang mantan, Yevhen Bokhashvili menggagalkan kemenangan PSS dengan melesakkan gol di masa *injury time* babak pertama. Sebelumnya, PSS unggul 1-0 lewat gol Nemanja Kojic menit 74.

Mengoleksi 20 poin dalam 16 pertandingan, PSS mungkin terlempar dari posisi 10 besar klasemen. Sementara Persipura, tambahan satu poin belum cukup untuk membawa Mutiara Hitam keluar dari zona merah.

Sejatinya, PSS tampil dominan di laga ini. Sempat tertahan tanpa gol di babak pertama, PSS bermain lebih agresif di babak kedua. Nemanja Kojic mendapatkan dua kali peluang emas di pertengahan babak kedua.

Namun, peluang pertama mampu digagalkan penjaga gawang Persipura, sedang peluang kedua membentur tiang gawang. Beruntung, peluang ketiga mampu dikonversi striker asal Serbia tersebut menjadi gol.

Berawal dari lemparan Aaron Evans, bola mengarah ke Kojic yang tak terkawal. Sepakan keras Kojic pun langsung menghujam gawang Persipura. Setelahnya, Dejan Antonic mengubah skema permainan dengan melakukan beberapa pergantian.

Tapi, perubahan justru memberi Persipura peluang untuk memberikan ancaman. Di masa tambahan waktu babak kedua, Yevhen Bokhashvili mampu menyeimbangkan skor dan menghindarkan Persipura dari kekalahan. **(Yud)-f**

SAKSI DUGAAN KORUPSI ANAK ALEX NOERDIN

KPK Panggil Istri Mantan Gubernur Sumsel

JAKARTA (KR) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (7/12), memanggil Eliza Alex Noerdin yang merupakan istri mantan Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Alex Noerdin untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Eliza selaku ibu rumah tangga dipanggil dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin, pada tahun anggaran 2021 yang menjerat anaknya, Bupati Musi Banyuasin nonaktif Dodi Reza Alex Noerdin (DRA).

"Hari ini (kemarin) pemeriksaan saksi tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun anggaran 2021 dengan tersangka DRA," ucap Plt Jubir KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, kemarin.

Selain Eliza, KPK juga memanggil Mursyid, ajudan Bupati Musi Banyuasin sebagai saksi untuk tersangka Dodi. KPK juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kepala Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Herman Mayori (HM), Kabid Sumber Daya Air (SDA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin Eddi Umari (EU) dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara Suhandy (SH).

KPK menjelaskan, Pemkab Musi Banyuasin pada tahun 2021 melaksanakan beberapa proyek yang dananya bersumber dari APBD, APBD-P TA 2021 dan Bantuan Keuangan Provinsi (bantuan gubernur), di antaranya pada Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin.

Untuk melaksanakan berbagai proyek dimaksud, diduga telah ada arahan dan perintah dari Dodi kepada Herman, Eddi dan beberapa pejabat lain di Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyuasin agar dalam pelaksanaan lelangnya direkayasa sedemikian rupa, di antaranya dengan membuat daftar paket pekerjaan dan telah pula ditentukan calon rekanan yang akan menjadi pelaksana pekerjaan tersebut.

Selain itu, Dodi juga telah menentukan persentase pemberian *fee* dari setiap nilai proyek paket pekerjaan di Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu 10 persen untuk Dodi, 3-5 persen untuk Herman dan 2-3 persen untuk Eddi serta pihak terkait lainnya. **(Ant)-f**

TERJEBAK BANJIR LAHAR DI KALI BEBENG

Sopir Truk Ditemukan Meninggal Dunia

KR-M Thoha

Jenazah dimasukkan ke dalam ambulans yang membawanya ke rumah duka.

MAGELANG (KR) - Pengemudi kendaraan truk yang terkena dampak banjir lahar di kawasan kaki Gunung Merapi, tepatnya di aliran Kali Bebeng Kecamatan Srumbung Kabupaten Magelang, berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, Selasa (7/12). Sekitar pukul 17.30 jenasahnya diberangkatkan dari kamar mayat RSUD Muntilan menuju rumah duka di Kabupaten Semarang dengan kendaraan ambulans, setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan tim Inafis Sat Reskrim Polres Magelang.

Kapolres Magelang AKBP M Sajarod Zakun SH SIK lewat Kasi Humas Polres Magelang Iptu Abdul Muthohir SH di kamar mayat RSUD Muntilan, mengatakan, setelah berhasil dievakuasi dari lokasi penemuan, jenazah langsung dibawa ke RSUD Muntilan untuk dilakukan pemeriksaan dan identifikasi.

Berdasarkan sidik jari dan pakaian yang dikenakan serta keterangan lainnya, jenazah yang ditemukan tersebut identik dengan pengemudi kendaraan truk Hendri S, warga Bergas Kabupaten Semarang.

Kapolsek Srumbung AKP Sumino SSos MM menambahkan jenazah ditemukan sekitar 500 meter dari lokasi kejadian, Rabu (1/12) lalu. Saat ditemukan, posisi badan tengkurap dan membungkuk di atas sebuah batu, kepala di sebelah utara. Kaki kanannya terimpit batu..

Proses evakuasi korban berlangsung sekitar 30 menit dan tubuh korban sempat tertimbun material di aliran Kali Bebeng kedalaman 1,5-2 meter. Koordinator Unit Siaga SAR Borobudur Basuki secara terpisah mengatakan, dengan ditemukannya korban, proses penyisiran dan pencarian dihentikan. **(Tha)-f**

BANGUN EKOSISTEM DATA DI DIY

Optimalkan Pemanfaatan Data Driven Policy Mewujudkan Akuntabilitas

Perwakilan Diskominfo DIY Sayuri Egaravanda

EKOSISTEM data tengah dibangun Pemda DIY dengan komitmen maupun kerjasama dari berbagai pihak dan para stakeholder di dalamnya. Selain itu, optimalisasi pemanfaatan ekosistem data dalam pengambilan kebijakan keputusan berbasis data atau data driven policy. Salah satunya terhadap perencanaan pembangunan di DIY yang tidak hanya sekedar memproduksi data, namun dapat kembali memanfaatkan seluas-luasnya dalam pembuatan kebijakan pro aktif dalam perencanaan itu sendiri. Manfaatnya tidak lain dalam perencanaan pembangunan DIY adalah mewujudkan akuntabilitas.

Perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY Sayuri Egaravanda yang disapa Sari menyatakan pihaknya mempunyai tugas utama menyiapkan ekosistem yang termasuk di dalamnya ekosistem data sesuai dengan tugas dan fungsi Kominfo. Ekosistem data tersebut meliputi infrastruktur, tata kelola atau manajemennya termasuk di dalamnya menyikapi jika diperlukan kebijakan-kebijakan yang mengiringi. Hal ini tidaklah mudah, proses transformasi manajemen data itu sendiri akan dipengaruhi oleh komitmen dari pihak-pihak atau stakeholder yang terlibat didalam ekosistem tersebut bisa jadi pemilik data, wali data dan sebagai pengguna data.

" Jika bicara soal perencanaan pembangunan di DIY, sebenarnya dalam setiap perencanaan pembangunan itu akan memproduksi data. Semisal kita akan menyusun anggaran dan sebagainya itu memproduksi data, tetapi itu seperti data masuk saja tidak ada value addict-nya yang bisa dimanfaatkan disana. Kesadaran produksi data dihasilkan di masing-masing tahap perencanaan pembangunan kembali bermanfaat ketika membuat kebijakan dari perencanaan itu sendiri," tuturnya kepada KR di Yogyakarta, Selasa (7/12)

Sari menekankan dengan catatan jika data tersebut memang dihimpun dalam satu tempat yang pas kemudian dilakukan pengelolaan manajemen tata kelola, diolah dengan teknologi tertentu sehingga akan menghasilkan rekomendasi atau kebijakan yang digunakan dalam perencanaan nantinya. Data driven policy ini bukan hal baru bagi Pemda DIY, contoh riilnya kebijakan Pemda DIY dalam pengelolaan data bantuan sosial (bansos) dan sebagainya.

"Semua ekosistem ini dibangun dalam kerangka Jogja Center salah satunya membangun ekosistem data dimana jutaan data sudah ada disana. Tantangannya, data-data tersebut bisa dimanfaatkan seluas-luasnya membantu perencanaan semisal dimanfaatkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) bagi pembuataan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DIY dan lainnya. Artinya ini akan menjadi dasar arah kebijakan DIY sehingga bisa melakukan kebijakan besifat reponsif tetapi kebijakan pro aktif dengan berbasis data kedepannya," tandasnya.

Kepala Bappeda DIY Beny Suharsono

Kepala Bappeda DIY Beny Suharsono menyampaikan Pemda DIY secara garis besarnya terus mendorong Jogja Smart Province (JSP) bisa diwujudkan segera dan kesiapannya terus didorong. Bahkan, Gubernur DIY sudah memerintahkan langsung agar memanfaatkan dan gunakan sepenuhnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK) pada 2022 sehingga mau tidak mau akan bergeser kesana. Artinya teknologi sudah menjadi keniscayaan yang harus diikuti seperti JSP yang salah satunya adalah mengoptimalkan pemanfaatan TIK.

" Semuanya akan mengarah kesana antara lain kita sudah melayani persuratan menggunakan elektronik, tetapi tidak serta merta lalu paperless. Kita ikuti dulu supaya layanan publik tidak terhenti. Jika semua TIK maka harus ada persiapan semuanya tidak hanya sepihak teknologinya ya termasuk orangnya dilibatkan, perubahan tata kelola demi keabsahan dan lain-lain," ujarnya. Beny menyebut masyarakat dapat melihat langsung diaplikasinya, siapa yang telah mereplikasi, memperbaiki, melihatnya dan sebagainya. Sudah 271 kabupaten/kota yang melihat dan lebih dari 100 kabupaten/kota sudah mereplika dari sisi perencanaan. Sedangkan dari sisi pengenalian juga begitu sampai pada penganggaran keuangan. Dalam hal ini, pihaknya tetap mengacu pada ketentuan Pemerintah Pusat. Sehingga publik sudah bisa membuka aplikasi tersebut sejak awal perencanaan dan seterusnya telah tersaji karena Pemda DIY telah menggunakan TIK.

" Satu-satunya yang menjadi concern pak Gubernur dari awal seperti ini harus jalan. Manfaatnya tidak lain adalah mewujudkan akuntabiltas, semakin kita dibuka pintunya lebih luas dari berbagai sisi dapat melihat, sebaliknya pintunya tertutup makin sulit diperiksa. Itulah menjadi proses pembelajaran yang tidak bisa instan," tandasnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKA) DIY Wiyos Santoso menegaskan ASN di lingkungan Pemda DIY dituntut untuk lincah dan adaptif terhadap perubahan lingkungan termasuk perubahan TIK. Apabila tidak bisa menyesuaikan maka akan tertinggal. Semua tidak bisa mengelak kehadiran TIK, mengingat banyak ASN yang tidak muda lagi alias banyak yang mendekati usia pensiun. Mereka harus siap terima dan bagaimanapun caranya tetap berupaya menyesuaikan dengan sistem semuanya. Pihaknya juga mengutamakan pembangunan SDM sampai Desa di DIY karena banyak aliran kas dari propinsi langsung ke Kalurahan saat ini.

" Tinggal lingkungan mereka saja bisa belajar menyesuaikan atau kita harapkan ada yang bisa menghandle dan sudah ada timnya dalam mengelola suatu aplikasi. Kita harus bisa memanfatkan teknologi, bukan kita yang dimanfaatkan. Terlebih ASN di lingkungan Pemda DIY banyak yang tidak muda lagi sehingga membutuhkan proses beradaptasi terhadap perubahan TIK. Tinggal bagaimana kita membantu mereka agar bisa beradaptasi," pungkasnya. **(Ira)**

Kepala BPKA DIY Wiyos Santoso